

BAHASA INDONESIA DALAM SEJARAH, KEBIJAKAN, DAN KUASA

Setia Naka Andrian

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang
pos-el: setianakaandrian@upgris.ac.id

ABSTRAK

Bahasa Indonesia berkait paut dengan sejarah, kebijakan, dan kuasa. Bahasa Indonesia bergerak sebagai sebuah entitas yang diperebutkan dalam medan kuasa. Kebijakan membentuk sebuah sistem yang dibentuk atas wewenang terhadap sesuatu untuk menentukan, memerintah, mewakili, dan mengurus suatu hal—melalui medan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia memiliki jangkauan yang luas atas sejarah, kebijakan, dan kuasa. Bahasa Indonesia bergerak dari masa ke masa, baik pada masa kolonial, kemerdekaan, dan pascakemerdekaan. Bahasa Indonesia berjalan beriringan dengan kebudayaan, sejarah, kebijakan, dan Riwayat kuasa di Indonesia. Semuanya berjalan beriringan, bahasa Indonesia dan berbagai bangunan lain yang menyertainya menjadi sebuah dinding yang terbentuk guna menyokong khazanah kemanusiaan. Bahasa menjadi bagian dalam sejarah, kebijakan, dan kuasa, begitu pula sebaliknya. Semua saling berjalan beriringan dalam mencipta narasi penghubung dari masa ke masa, dari kuasa ke kuasa.

Kata kunci: bahasa, sejarah, kebijakan, kuasa

ABSTRACT

Indonesian is closely related to history, policy and power. Indonesian moves as an entity that is contested in the field of power. Policy forms a system that is formed by the authority over something to determine, govern, represent, and manage something - through the Indonesian language field. During its development, the Indonesian language has a wide range of history, policies, and power. Indonesian language moves from time to time, both during the colonial, independence and post-independence periods. Indonesian goes hand in hand with culture, history, policies, and history of power in Indonesia. Everything goes hand in hand, the Indonesian language and various other structures that accompany it become a wall that is formed to support the treasure of humanity. Language becomes part of history, policy and power, and vice versa. All go hand in hand in creating a connecting narrative from time to time, from power to power.

Keywords: language, history, policy, power

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia menjadi dinding yang membatasi dan melindungi serta turut serta dalam membentuk khazanah kemanusiaan di Indonesia. Bahasa menjadi sebuah sarana, narasi penghubung berbagai hal yang menjadi tujuan-tujuan seseorang atau kelompok untuk mencapai sesuatu. Sedangkan pada dinding lain didapati beberapa hal yang melingkupinya, di antaranya sejarah, kebijakan, dan kuasa. Semua itu bergerak beriringan dan membentuk semangat penempaan terhadap kematangan pengetahuan yang sejatinya sudah bergerak sebelum bahasa itu sendiri digunakan atau bahkan sebelum ditemukan. Bahasa Indonesia menjadi sebuah wilayah yang tumbuh dan berkembang beriringan dengan kebudayaan dan berbagai aspek lain. Sehingga tidak ayal, semuanya menjadi sebuah sistem yang saling diperebutkan. Bagaimana semua itu dibentuk, dikembangkan, atau bahkan dihancurkan. Segala itu tentu tidak jauh-jauh dari dalih kemajuan, baik bagi bahasa maupun kebudayaan—dengan muara yang sama-sama berdalih untuk kepentingan rakyat. Namun tidak dapat dimungkiri, ketika hasrat yang digelorakan oleh diri personal maupun diri komunal untuk pemenuhan itu sudah memuncak dan tak terbendung lagi, sudah pasti kebijakan dan kuasa menjadi berderet persoalan yang kerap tidak pernah utuh dan tidak pernah akan selesai.

Kebijakan dan kuasa seolah-olah hadir untuk mengelabui setiap perkara yang seharusnya lebih diberi posisi dan diperjuangkan lebih tinggi dari hasrat diri personal dan diri komunal. Lebih-lebih mengenai bahasa yang bagi Alif Danya Munsyi atau Remy Sylado atau penulis kesohor yang memiliki nama asli Yapi Tambayong (2005:4-5) sebagai bahasa yang indah dan tepat, bukan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tentu yang seharusnya dapat ditawarkan dalam pembelajaran sastra baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Bahwasanya dari situ, sebagai penulis karya kreatif misalnya, Alif Danya Munsyi menekankan seseorang haruslah memiliki perasaan estetik terhadap bahasa Indonesia, yang niscaya harus berbeda dan bahkan cenderung harus dikatakan secara sadar dan sengaja tidak setia—untuk tidak berkata tidak patuh—pada rambu-rambu bahasa baku di bawah ‘selera’ lembaga bahasa Indonesia (Badan Bahasa), yang baginya begitu mengikat. Baginya yang baku cenderung kaku dan selanjutnya menjadi tidak laku.

Seperti halnya jika kerap kali dihadapkan pada berbagai persoalan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Kita begitu saja merasa berbangga dan besar kepala dengan menyebutkan berderet bangsa dan negara lain yang katanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diakui di negaranya. Meski sesungguhnya itu bisa jadi masih menjadi simpulan umum atas temuan yang patah-patah. Ataupun menjadi kebanggaan tersendiri misalnya jika didapati orang-orang asing (ahli Indonesia) yang ternyata mereka dianggap sebagai seseorang yang begitu besar kecintaannya terhadap Indonesia. Oleh karenanya dalam seutuh hidupnya kerap diabdikan untuk kepentingan berbagai penelitian tentang Indonesia. Baik mengenai riset sejarah, pendidikan, politik, bahasa, sastra, dan lainnya. Sudah tentu ahli Indonesia tersebut merupakan bangsa asing yang begitu mahir menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bisa jadi kecintaannya terhadap bahasa Indonesia melampaui kecintaan bangsa Indonesia sendiri terhadap bahasanya.

Seseorang dalam sebuah bangsa dan negara akan menggunakan bahasa tertentu yang bukan bahasa negaranya, tentulah melewati berbagai alasan ketat. Misalnya bagaimana mereka menginginkan sesuatu terhadap bangsa tertentu, baik dalam dalih apa pun, jika seseorang itu sudah meyakini untuk menggapainya, maka sudah pasti seseorang itu akan melakukan segalanya—termasuk jika harus sepenuhnya mempelajari bahasanya. Dari hal tersebut tentu sudah pasti ada maksud tertentu yang menggiring seseorang untuk mempelajari bahasa lain selain bahasa dari negaranya sendiri. Di luar itu diwujudkan sebagai maksud baik ataupun maksud buruk. Meski sungguh, tidak sedikit upaya yang dilakukan untuk menduniakan bahasa Indonesia. Segala itu tentulah sebagai sebuah upaya mulia. Namun tidak bisa jika itu hanya disuarakan semata dan hanya berhenti pada ruang-ruang seminar yang digelar dengan begitu mentereng dalam label internasional. Sudah tentu ada kerja besar di balik segala impian itu. Bagaimana manusia dan sumber daya lainnya menjadi pijakan sekaligus penopang, atau bisa jadi menjadi kendaraan untuk dinaiki bahasa Indonesia hingga dapat berkeliling dan selanjutnya bermukim di berbagai belahan dunia.

Misalnya saja ada tawaran tersendiri mengenai apa saja yang dapat ditunggangi oleh bahasa. Bahasa menjadi perkara yang tidak biasa, ada kerja-kerja

estetik yang dipertaruhkan di dalamnya. Baik melalui sebuah produk berupa karya atau berbagai wujud lainnya. Termasuk perihal bahasa yang mengendarai kuliner untuk berkeliling ke berbagai belahan dunia. Bisa jadi karya sastra dan berbagai khazanah kebudayaan Indonesia turut serta memiliki daya tawar dan daya pikat tersendiri bagi bangsa asing. Namun lagi-lagi segala itu kerap kali terjebak dalam beberapa persoalan yang menjebak, tidak lain terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengikat atau hal lain yang berkait-paut pada persoalan dalam lingkaran kuasa. Itulah sebabnya mengapa bagi Alif Danya Munsyi begitu lantang menyuarakan perihal bahasa. Baginya, kebebasan menjadi alat utama dan penentu dalam kerja kebahasaannya. Misalnya dalam hal membedakan pikiran dan perasaan terhadap isyarat-isyarat mengenai baik dan benar dalam bahasa, ia akan lebih memilih untuk mencari dan menemukan model bahasa dalam berbagai kemungkinan-kemungkinannya—khususnya dalam mengeja kata-kata tertentu—yang bisa mewakili isyarat-isyarat artistik dan estetik di suatu pihak, dan isyarat-isyarat naturalistik dan realistik di lain pihak. Untuk itu, Alif Danya Munsyi tidak bicara mengenai baik dan benar dalam karya kesenian bahasa Indonesia, melainkan bahasa yang indah dan tepat. Lingkup tepat yang bermuara pada keindahan tersebut tentulah akan lebih memiliki nilai tawar, misalnya, jika dibandingkan dengan baik dan benar, yang seolah-olah dari situ muncullah berbagai dinding pembatas yang sulit untuk ditembus. Paling tidak, bagi Alif Danya Munsyi, bahwasanya melalui kata “indah” maka di dalamnya hendak diejawantahkan dorongan-dorongan estetik, dan dengan kata “tepat” maka di dalamnya hendak diwujudkan pandangan-pandangan tentang akal-budi yang tidak mungkin dieksplorasi secara tuntas, melainkan harus diekspresikan dengan semaksimal mungkin. Tentu melalui bahasa yang terang-benerang, yang bermula dan bermuara dari keindahan dan ketepatan, bukan yang baik dan yang benar.

Dasar pikiran atas hal tersebut, bagi Alif Danya Munsyi antara lain mengenai pengamatan terhadap bahasa baku yang terlalu kaku, bahasa yang cara mengeja kata-kata terlalu membingungkan, serta, katakanlah, membinasakan kata-kata lain yang hidup dan mewakili realitas sekaligus memenuhi idealitas keindahan dan ketepatan dalam bahasa kreatif karya-karya susastra. Belum lagi jika dihadapkan pada persoalan

lain yang tentu sangat menyudutkan bahasa atas berbagai dalih perkembangan dan kemajuan, meski sesungguhnya segala itu hanya berujung pada persoalan yang tidak jauh-jauh dari wilayah kepentingan dan kuasa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi literatur terhadap berbagai buku dan artikel terkait sejarah bahasa Indonesia, kebijakan dan kuasa. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pembacaan kritis, kemudian menyimak kembali, menerjemahkan data, mengklarifikasi data, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. Analisis data ditempuh dengan membandingkan, menginterpretasi data, mengonfirmasi hasil interpretasi data, dan membuat laporan sementara untuk hasil analisis data. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang melakukan langkah-langkah penelitian dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap sesudah penelitian. Pada tahap sebelum penelitian, instrumen utama melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu 1) membaca literatur; 2) melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian; 3) mengidentifikasi masalah; 4) melakukan pembatasan masalah; dan 5) menetapkan fokus masalah. Pada tahap pelaksanaan penelitian instrumen utama melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu 1) pengumpulan data dan sumber data; 2) pengolahan dan pemaknaan data; dan 3) pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya, pada tahap setelah penelitian, instrumen utama melakukan langkah-langkah, yaitu 1) penarikan simpulan; 2) penyusunan laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Indonesia dalam sejarah, kebijakan, dan kuasa, berpijak pada sebuah temuan-temuan yang ditawarkan dan tentu diyakini oleh Joss Wibisono (2020:30-32) terkait gerak bahasa Indonesia—mengenai kebijakan penggantian ejaan Suwandi menjadi Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Bagi penulis dan wartawan lepas yang menetap di Amsterdam dan sempat bekerja pada Siaran Indonesia Radio Netherland di Hilversum selama 25 tahun hingga 2012 itu, mengaku lebih senang menulis menggunakan ejaan Suwandi daripada menggunakan EYD. Bahkan segala itu tidak

hanya dilakukannya dalam tulisan-tulisannya (cerita pendek, esai, dan novel) yang banyak menyoroti mengenai bahasa, sejarah, seni, dan budaya Indonesia dari Belanda itu. Baginya ejaan Suwandi lebih artistik, oleh karenanya tidak hanya saat menulis karya saja, saat ia mengirim pesan singkat melalui gawai dan mengunggah status di media sosial pun ia selalu menggunakan ejaan Suwandi. Sampai sekarang masih seperti itu, dan naga-naganya akan seperti itu seterusnya. Sebab baginya pula, berikut dikutip dari bukunya menggunakan ejaan Suwandi.

Siapa berani membantah kenyataan bahwa generasi muda zaman sekarang sangat ogah bahkan sama sekali tidak doyan membatja tulisan² dalam edjaan Suwandi jang berlaku sampai 1972? Dan memang inilah tudjuan sebenarja atjara ganti edjaan itu. Generasi harus dibuat tidak doyan membatja tulisan² zaman sebelum orde bau, artinja, seperti ujar ben Anderson, "pengetahuan generasi muda terhadap sedjarah Indonesia Sebagian besar hanja berasal dari penerbitan² OrdeBaru". Mengikuti alur berpikir orde bau jang begitu se-wenang², makaakan gawat sekali kalua generasi muda Indonesia sampai melek sedjarah. Begitu melek sedjarah mereka akan langsung tahu dan paham bahwa perlakuan orde bau terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan kiri lain djauh lebih buruk ketimbang apa jang dilakukan oleh penguasa kolonial Belanda pada 1926 terhadap PKI jang waktu itu betul² memberontak. Kalau pendjajah Belanda paling banter membuang para pemberontak komunis it uke Boven Digoel, maka bukan pembuangan belaka jang dilakukan orde bau terhadap kalangan komunis jang waktu itu diasingkan ke pulau Buru. Korban paling banjak adalah pembunuhan mereka jang ditjap komunis atau kaum kiri lain. Salah seorang algodjo orde bau bahkan berani sesumbar dengan mengatakan bahwa djumlah orang komunis jang diganjang habis mentjapai tiga djuta orang, separuh korban fasisme Djerman. Supaja perbedaan kekedjaman orde bau dengan pendjadjah Belanda ini tidak kelihatan, generasi muda harus dibuat buta sedjarah. Dengan begitu keburukan orde bau tidak (langsung) terbongkar. Dan itulah jang sekarang benar² terdjadi, generasi muda jang dibesarkan dalam EYD sudah tidak peduli lagi terhadap buku atau sumber tertulis lain jang tidak ditulis dalam edjaan rekajasa rezim tangan besi ini. Itulah alesan utama mengapa Ben Anderson meninggalkan EYD dan kembali menulis dalam edjaan Suwandi. Sebagai orang jang beladjar bahasa Indonesia dalam edjaan tersebut, ini djelas perkara gampang, seperti balik asal. Tapi dengan menghidupkan apa jang orde bau ditjibir sebagai ejaan lama, djelas Anderson ingin berpaling pada zaman ketika orang Indonesia lebih mandiri dan kreatif dalam berbahasa. Bahasa Indonesia waktu itu, seperti aliran politiknnya (Ben Anderson) jang terbentang dari kanan ke kiri, djuga lebih madjemuk, beragam, tidak seragam seperti bahasa orde bau jang tampil berkuasa dengan membasmi kalangan kiri (batja: mengkanankan Indonesia). Kalau edjaan itu tidak terputus, dalam arti ada kelanjutan edjaan, sehingga orang terus membatja tulisan² djadoel, nistjaja mereka akan mendapati bahwa dalam memberlakukan edjaan barunja, orde bau ternjata tjuman bisa mendjiplak, alias membeo kelakuan Belanda kolonial.

Bukankah si pendjadjah telah duluan memberlakukan edjaan Van Ophuysen tahun 1901? Dalam sebuah tulisan jang membandingkan politik bahasa pendjadjah Spanjol di Filipina dan pendjadjah Belanda di Indonesia, Benedict Anderson (1996:21-22) menundjuk, bahwa standardisasi bahasa dan edjaan jang dilakukan penguasa kolonial telah menjingkirkan peran penting dua kelompok dalam perkembangan sedjarah dan sastra Indonesia. Pertama, kalangan Tionghoa, merekalah pihak jang pertama kali menggunakan dan menjebarkan bahasa melajoe pasar (tjikal bakal bahasa Indonesia). Tatkala suku² lain masih sibuk berkomunikasi dengan bahasa dan tulisan daerah masing² (atau tulisan Arab Djawi) sedjak 1880an kalangan Tionghoa ini sudah menerbitkan buku, koran, dan pelbagai barang tjetak lain. Kedua, kalangan radikal, biasanja pihak komunis dan wartawan jang sibuk melontarkan tulisan² anti kolonialisme. Tindakan orde bau mengganti edjaan djelas tidak berbeda dengan ulah litjik pendjadjah belanda. Mereka sama² menghapus peran kalangan progresif dan pihak kiri, se-olah² hanja pihak kanan jang berperan di Indonesia.

Dari berderet pengisahan yang ditawarkan oleh Joss Wibisono tentu dapat menjadi pijakan tersendiri dalam persoalan mengenai bahasa dan kuasa. Bagaimana kuasa bekerja dalam bahasa, bagaimana bahasa menjadi ruang tertutup yang sulit ditembus. Meski sesungguhnya di dalam ruang yang tertutup, gelap, dan sulit ditembus itu didapati sejarah, pengetahuan, dan seabrek nilai-nilai keindonesiaan yang sudah pasti menjadi galian emas bagi pendidikan Indonesia. Persoalan politik dan kuasanya menjadi pagar pembatas yang terus-menerus dimakan begitu saja oleh generasi muda yang seharusnya menjadi tumpuan utama masa depan bangsa dan negara ini. Sudah menjadi persoalan klasik, setiap terjadi sesuatu, begitu saja segalanya diputus begitu saja. Seakan tidak lagi didapati niatan untuk melanjutkan. Termasuk pada jejak ejaan yang ada di Indonesia, yang ditawarkan oleh Joss Wibisono dalam berbagai temuan-temuannya—dalam tulisan-tulisannya mengenai persoalan ejaan bahasa Indonesia, dari ejaan Suwandi yang digantikan EYD.

A. Sejarah Bahasa Indonesia

Sejarah bahasa Indonesia tentu tidak bisa lepas dari beberapa ejaan yang berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya tersebut pun tentu berkait-paut dengan segala hal yang digulirkan dari kebijakan sebuah bahasa. Ada beberapa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia dan beberapa jejak ejaan itu dikisahkan begitu gamblang oleh Wirjosoedarmo (1987:68-75), di antaranya Ejaan Charles Adriaan van Ophuysen (Ch. A. van Ophuysen), Ejaan Soewandi (Ejaan Republik) dan Ejaan yang

Disempurnakan (EYD), meski kini berkembang menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

1. Ejaan Ch. A. van Ophuysen

Pada 1900, Ch. A. van Ophuysen, seorang Belanda totok yang lahir di Solok, Sumatera Barat, pada tahun 1856 dan tumbuh besar di lingkungan pribumi. Ch. A. van Ophuysen mendapat perintah dari Pemerintah Hindia Belanda untuk membuat sebuah konsep ejaan bahasa Melayu di Indonesia. Sebelum itu telah diajarkan ejaan Latin pada kebanyakan sekolah dan juga sudah dipraktikkan, tetapi tanpa pengarahan, sehingga di pelbagai sekolah diikuti ejaan-ejaan yang berlainan satu dengan yang lain. Hal itu merupakan ancaman akan timbulnya kesewenang-wenangan dan kekacauan dalam ejaan. Berdasarkan konsep Ch. A. van Ophuysen tersebut akhirnya pada 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda diterapkan berlakunya ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin dan diberi nama sesuai dengan nama penciptanya, yakni Ejaan Ch. A. van Ophuysen. Ejaan tersebut berlaku juga sampai saat diproklamasikannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928, bahkan berlaku pada zaman pendudukan Jepang dan berakhir pada zaman Republik pada 1947. Ejaan Ch. A. van Ophuysen betapa pun kurang sempurnanya, namun tidak dapat disangkal bahwa sistem itu telah memberikan jasa-jasanya dalam mempersatukan bahasa Indonesia serta ejaannya.

2. Ejaan Soewandi (Ejaan Republik)

Sejak berlakunya Ejaan Ch. A. van Ophuysen sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan usaha penyempurnaannya. Usaha itu pertama kali disarankan dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Sala pada 1938. Langkah penyempurnaan berikutnya ialah dengan ditetapkannya Ejaan Soewandi (Ejaan Republik) yang mulai berlaku pada 1 April 1947. Pada dasarnya Ejaan Soewandi tidak berbeda banyak dengan Ejaan Ch. A. van Ophuysen. Ejaan Soewandi dapat dipandang sebagai usaha menyederhanakan Ejaan Ch. A. van Ophuysen. Usaha penyempurnaan berikutnya ialah dengan dikeluarkannya surat edaran Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Pengetahuan Republik Indonesia yang menetapkan tanda "oe" untuk bahasa Indonesia diganti dengan "u" mulai 1 Januari 1949. Dengan Surat Keputusan Menteri

Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (Mr. Soewandi) tertanggal Jakarta, 19 Maret 1947 no. 435/Bhg. A, Republik Indonesia menetapkan ejaan baru bagi bahasa Indonesia mengganti Ejaan Ch. A. van Ophuysen.

3. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)

Ejaan Soewandi (Ejaan Republik) ternyata dianggap masih memiliki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, sehingga Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada 1954 memutuskan untuk menyempurnakan ejaan tersebut. Usaha penyempurnaan Ejaan Soewandi (Ejaan Republik) ternyata berlangsung lama, dan menimbulkan lahirnya konsep Ejaan Pembaharuan (1956), konsep Ejaan Melindo (1959), konsep Ejaan Samsuri (1960), dan konsep Ejaan LBK (1966).

Konsep Ejaan Pembaharuan, konsep Ejaan Melindo, dan konsep Ejaan Samsuri dianggap tidak praktis, tidak efisien dan tidak ekonomis, karena ketiga konsep tersebut mengajukan huruf-huruf baru yang apabila diresmikan pemakaiannya akan memakan biaya yang besar untuk memperbaharui mesin-mesin tik dan mesin-mesin cetak. Konsep Ejaan LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan) merupakan konsep yang lebih sempurna daripada ketiga konsep sebelumnya, dan menjadi dasar terjadinya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Setelah konsep Ejaan LBK mengalami pelbagai macam penyempurnaan, maka dalam pidato kenegaraan Republik Indonesia pada 16 Agustus 1972 berdasarkan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972, dengan nama Ejaan Baru Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, kemudian terkenal dengan singkatan EYD. Usaha penyempurnaan dari Ejaan Soewandi menjadi Ejaan yang Disempurnakan tersebut bertolak dari keperluan: 1) menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia, 2) membina ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca, 3) memulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh, 4) mendorong pengembangan bahasa Indonesia.

Ejaan Soewandi	Ejaan yang Disempurnakan
dj : djalan	j : jalan

j : pajung	j : payung
nj : njonja	ny : nyonya
sj : sjarat	sy : syarat
tj : tjakap	c : cakap
ch : tarich	kh : Tarikh

4. Latar Belakang Penyusunan Ejaan Baru

Ejaan yang Disempurnakan (EYD) atau Ejaan Baru, memiliki latar belakang resmi, oleh karena ejaan tersebut langsung diketuk palu oleh pemimpin tertinggi di negara ini. Barangkali segala inilah yang membuat Joss Wibisono, termasuk Benedict Anderson serta pemerhati bahasa Indonesia lain geram. Bahwa dari persoalan penggantian ejaan itu turut campurlah tangan-tangan kekuasaan di dalamnya.

Harimurti Kridalaksana (1985:37-38) menuliskan bahwasanya pada 16 Agustus 1972, oleh Presiden Soeharto diresmikanlah ejaan resmi bahasa Indonesia yang disebut Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Sistem ejaan ini tumbuh dari sistem Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1966. Dari 1966 hingga 1972, Harimurti Kridalaksana ikut aktif dalam panitia ejaan, dan telah menulis belasan artikel, baik ilmiah maupun populer, mengenai EYD. Salah satu faktor yang mendorong penulis ikut aktif di dalamnya ialah kenyataan, bahwa usaha pembaharuan ejaan telah dimanfaatkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada 1954, dan pekerjaan sekarang ini tidak lain daripada meneruskan usaha para pelopor bahasa Indonesia dalam kongres tersebut. Di sini dimuat salah satu karangan HK mengenai soal yang pernah dan akan tetap actual dalam sejarah bahasa Indonesia.

B. Bahasa dalam Kebijakan dan Kuasa

1. Kebijakan Bahasa

Menurut Dalimunte (2016) dalam "Implementasi Kebijakan Bahasa dan Implikasinya dalam Penguatan Identitas, Integritas, dan Pluralitas Bangsa", bahwasanya mengenai banyaknya masalah yang mendorong pentingnya implementasi kebijakan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di antaranya mengenai masalah non-kebahasaan (pengaruh globalisasi dan ancaman disintegrasi bangsa) terlebih lagi masalah kebahasaan yang terjadi pada 2 ranah, yaitu pada skala nasional (sikap berbahasa dan intervensi bahasa Inggris terhadap penggunaan bahasa

Indonesia) dan pada skala regional (kepunahan dan pergeseran bahasa-bahasa lokal). Selanjutnya terkait regulasi kebahasaan yang diimplementasikan akan berimplikasi terhadap penguatan identitas, integritas, dan pluralitas bangsa.

Selanjutnya Wijana (2018) dalam “Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia” mengenai pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang cukup dominan di dalam bahasa Indonesia. Sementara itu pengaruh bahasa Belanda semakin kecil karena peranannya sudah digantikan oleh bahasa Inggris. Bahasa Arab karena semakin berkembangnya agama Islam yang di dalam berbagai hal yang berkaitan dengan segi-segi ritual harus dilak-sanakan dengan bahasa Arab, mengakibatkan pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia menjadi cukup besar pula. Lagi pula secara kebetulan cerita pendek yang diteliti adalah cerita pendek yang berkaitan dengan nuansa dan nilai-nilai keislaman.

Dalam temuan Susilo (2014) dalam “Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi: Permasalahan dan Solusi”, menitikberatkan pada bahasa Indonesia yang telah menunjukkan jati dirinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga mampu menunjukkan identitasnya sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dalam ruang lingkup lokal maupun global. Selanjutnya era globalisasi telah membawa perubahan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing bersama-sama dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi tidak terelakkan. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kedwibahasaan. Untuk mempertahankan eksistensi pemakaian bahasa Indonesia, diperlukan adanya pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan mulai tingkat bawah hingga tingkat atas.

Menurut Mulyana (2018) dalam “Isu-isu Kritis Kebijakan bahasa dan Pengajaran Bahasa”, menitikberatkan suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya khususnya untuk kebijakan bahasa. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi pemegang kebijakan, sikap penutur bahasa, dana, dan ketenagaan. Kadang rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari pemegang kebijakan, maksudnya pemegang kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan. Misalnya di Indonesia, lembaga yang

ditugaskan untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan, dalam hal ini pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa.

Berdasarkan temuan Suwarno, Bambang dan Chelsea Larasati Yanwar (2019) dalam “Kebijakan Bahasa: Kembali ke Semangat Sumpah Pemuda 1928”, bahwasanya kebijakan bahasa di Indonesia memiliki tonggak sejarah Sumpah Pemuda 1928, yang butir ketiganya berbunyi, “ ... menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Jika merujuk ke semangat Sumpah Pemuda ini, bahasa Indonesia memang diutamakan, yaitu, menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara, yang dipakai di berbagai ranah, misalnya bahasa di tempat kerja dan bahasa pengantar pendidikan. Namun, kepada bahasa nonnasional, yaitu bahasa daerah dan bahasa Inggris, juga diberikan peran yang memadai. Kenyataannya, dalam kebijakan bahasa selama ini, peran yang diberikan kepada bahasa nonnasional kurang/tidak memadai.

Selanjutnya menurut temuan Moriyama (2018) dalam “Masyarakat Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia” dalam hal ini, disampaikan bahwasanya bahasa itu sulit diatur. Yang dapat dilakukan adalah menyarankan pemakaian bahasa secara tidak langsung. Pada zaman demokratisasi dan kebebasan masyarakat tidak bisa diarahkan dengan peraturan yang mendikte. Pada zaman globalisasi ini pemakaian bahasa yang pantas harus dipikirkan oleh masyarakat dan juga organisasi yang bertanggung jawab. Perlu diberi tahu bagaimana pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Kemampuan menulis yang baik itu perlu dibina dengan sungguh-sungguh.

2. Bahasa dan Kuasa

Bahasa dalam jeratan kuasa mendorong terjadinya persoalan terkait bagaimana implementasi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa menjadi sebuah entitas yang diperebutkan. Bahasa menjadi mula dan muara suatu pertimbangan yang berujung pada bagaimana kebijakan dan kuasa menjadi pokok permasalahannya. Dari beberapa hal yang melingkupi tersebut, bahasa seakan tidak sepenuhnya leluasa berpijak pada segala hal yang mengharuskan

berhadap-hadapan langsung dengan pemilik kuasa. Seperti halnya ditegaskan Rony K. Pratama dalam laman gatholotjo.com milik Joss Wibisono. Berikut dikutip utuh menggunakan ejaan Suwandi.

Bahasa selalu bersifat politis. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, sebagaimana dipahami djamak orang, melainkan djuga instrumen dan medium kekuasaan. Tjorak kekuasaan dalam bahasa salah satunya ditandai oleh sistem edjaan. Sebuah pendisiplinan jang subtil di tengah keanekaragaman ekspresi berbahasa masjarakat.

Joss Wibisono dalam buku terbarunja bertadjuk *Maksud politiek djahat* (2020) setjara lugas menguraikan kedudukan bahasa dan kekuasaan di Indonesia. Kritik tadjamnja terhadap penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) membongkar praktek diskursif rezim Soeharto selama tiga dekade. Rezim otoriter pada semua lini kehidupan masjarakat Indonesia waktu itu ternjata menjembunjikan “maksud jahat” di balik kebidjakan EYD.

Joss meneropong realitas itu dengan djeli dan kritis. Generasi kiwari jang terbiasa EYD akan kesusahan membatja literatur dengan sistem edjaan Suwandi. Pada skala lebih luas, generasi tersebut akan “dibutakan” oleh kenjataan sedjarah, sehingga lengkap sudah mereka tertjengkeram oleh politik bahasa. Situasi ini, bagi Joss, merupakan ketjenderungan penguasa jang radjin “meng-obok2” bahasa demi kepentingan politiknya (2020:33).

Selanjutnya, disampaikan pula oleh Pratama (2018) dalam artikelnya berjudul “Relasi Kebijakan dan Politik Bahasa”, bahwasanya secara ontologis “kebijakan” lahir dari derivasi “kepentingan politik” sehingga dua kata ini berposisi resiprokal, sedangkan bahasa bisa berposisi netral, namun para praksisnya, bila ditempatkan dalam konteks kebijakan institusional, tetap dijalankan oleh kepentingan politik. Dalam hal ini kerja sebuah negara begitu rupa berperan signifikan untuk mengatur jalannya politisasi bahasa. Apalagi jika dikontekstualisasikan ke dalam ranah pendidikan, negara memiliki otoritas tunggal untuk menentukan arah politik bahasa. Tentu di dunia pendidikan menjadi pertimbangan penting yang sangat erat kaitannya keberlangsungan kerja sebuah bahasa. Bagaimana bahasa disuntikkan dalam setiap aktivitas yang terpetak-petak dalam kurikulum. Selanjutnya yang menjadi persoalan dalam perkembangannya, apakah perubahan ejaan itu menandakan suatu antithesis terhadap kekuasaan sebelumnya. Pertanyaan tersebut tentu menarik untuk diulas sekilas jika melihat Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto yang mengubah ejaan secara totaliter. Soeharto menghendaki perubahan itu agar menggencarkan sebuah

politik identitas untuk “melawan” rezim sebelumnya. Politik identitas melalui bahasa ini membuat generasi yang dididik di bawah Orde Baru akan lebih familier EYD ketimbang Ejaan Suwandi.

SIMPULAN

Bahasa Indonesia dalam sejarah, kebijakan, dan kuasa menjadi tolok ukur dalam perkembangan khazanah kemanusiaan di Indonesia. Segala perhatian dan kecaman kerap kali muncul di antara para pemerhati bahasa Indonesia. Pro dan kontra menjadi ladang penemuan segala hal yang berkait paut dengan bagaimana bahasa Indonesia bekerja berhadapan dengan sejarah, kebijakan, dan kuasa. Tentu saja segala itu tidak lain karena kebijakan yang dirasa begitu ketat tanpa celah dan sebuah kerja kuasa yang begitu saja mematkan segala hal yang melingkupinya. Kebijakan yang dihadirkan seakan telah begitu saja menyangkal keberadaan bahasa dengan proses politik dan dinamika kekuasaan yang tidak semestinya. Pada persoalan dihapusnya begitu saja sebuah ejaan (Ejaan Suwandi) dengan diganti dengan ejaan baru (EYD), dalam kasus tersebut didapati beberapa konsekuensi logis, antara lain mengenai generasi muda enggan membaca referensi maupun narasi historis yang diproduksi oleh penguasa sebelumnya karena tidak lazim. Rekam jejak Soekarno dalam perspektif pustaka, misalnya, akan dianggap lapuk atau kuno sehingga generasi baru akan melupakannya secara berangsur hingga suatu saat akan tiba pada titik yang benar-benar melupakannya. Realitas tersebut tentu dapat dilihat gamblang dalam sebuah penguatan pada penggunaan istilah “Orde Baru” dan “Orde Lama”. Dari istilah tersebut tentu akan nampak bagaimana sesuatu yang baru meniscayakan harapan dengan berbagai gelimang impian, sedangkan yang lama mesti harus ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Lebih-lebih jejak yang melingkupinya itu diputus begitu saja, agar generasi selanjutnya tidak sedikitpun dapat tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada masa sebelumnya. Dari berderet hal yang tersaji tersebut, kemudian posisi kekuasaan terlihat implisit dan menyelina lewat kebijakan bahasa. Transformasi kebijakan penstandaran bahasa kemudian difokuskan sebagai bentuk praktik kekuasaan yang berlaku pada periode tertentu. Lantas selanjutnya akan

tidak berlaku pada periode berikutnya (periode mendatang). Oleh karenanya kuasa telah bekerja lebih cepat untuk sesegera mungkin melenyapkan jejak-jejak sebelumnya yang telah lewat dan mendahuluinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnadib, Sutari Imam (1983). *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dalimunte, Ahmad Amin (2016). “Implementasi Kebijakan Bahasa dan Implikasinya dalam Penguatan Identitas, Integritas, dan Pluralitas Bangsa”. *Jurnal Humaniora Teknologi* Vol. II No.I; Oktober 2016.
- Kridalaksana, Harimurti (1985). *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Moriyama, Mikihiro (2018). “Masyarakat Multilingual dan Kebijakan Bahasa di Indonesia”. Kongres Bahasa Indonesia XI yang akan dilaksanakan pada tanggal 28–30 Oktober 2018 di Jakarta.
- Mulyana, Ajeng Tina (2018). “Isu-isu Kritis Kebijakan bahasa dan Pengajaran bahasa”. *Jurnal Biomatika, Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Subang* Vol 4 No. 1 Februari 2018.
- Munysi, Alif Danya (2005). *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pratama, Ronny K. (2018). “Bahasa, Negara, dan Kekuasaan: Struktur-Kultur Politik Kebijakan Bahasa Indonesia”. *Jurnal Diksi* Volume 26, Nomor 2, September 2018.
- Pratama, Ronny K. (2020). “Di Balik Bahasa Ada Kuasa”. *gatholotjo.com*. 1 Desember 2020.
- Susilo, Jimat (2014). “Kebijakan Pendidikan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi: Permasalahan dan Solusi”. *Jurnal Logika*, Volume XII, No. 3 Tahun 2014.
- Suwarno, Bambang dan Chelsea Larasati Yanwar (2019). “Kebijakan Bahasa: Kembali ke Semangat Sumpah Pemuda 1928”. *Prosiding Seminar Nasional Bulan bahasa (Semiba) 2019*. Halaman 1920198.
- Wibisono, Joss (2020). *Maksud Politik Jahat; Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa*. Yogyakarta: Penerbit Tanda Baca.
- Wijana, I Dewa Putu (2018). “Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Indonesia”. *Jurnal Widyaparwa*, Volume 46, Nomor 1, Juni 2018.
- Wirjosoedarmo, Soekono (1987). *Tata Bahasa Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Sinar Wijaya.